

BAB II

Civil Islam di Cirebon Raya: Catatan Pengamatan terhadap Islam dan Demokrasi

Cahyo Pamungkas & A. Syatori

Tulisan ini merujuk pada Hefner (2000), berawal dari pertanyaan sejauh mana praktik sosial politik organisasi-organisasi masyarakat sipil Islam cenderung memperkuat nilai-nilai demokrasi dan kewargaan atau malah melemahkan. Tentunya beberapa tahun setelah tulisan Hefner beberapa sarjana dalam kajian Islam telah banyak menjelaskan bahwa Indonesia sedang mengalami fenomena *conservative turn* (belokan konservatif), yaitu pergeseran menuju sikap dan praktik serta orientasi keagamaan yang semakin konservatif (Bruinessen, 2013). Pandangan lain melihat bahwa sesungguhnya yang terjadi bukan lah *Islamic turn*, tetapi *illiberal turn* (Hadiz, 2017), yaitu meningkatnya politik populis yang melemahkan nilai-nilai demokrasi liberal, seperti kesetaraan dan penghormatan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Selain itu, tulisan Mietzner et al. (2018) menunjukkan bahwa merujuk

C. Pamungkas & A. Syatori

Badan Riset dan Inovasi Nasional, *e-mail*: cahyopamungkas@gmail.com

© 2024 Editor & Penulis

Pamungkas, C. & Syatori, A. (2024). *Civil Islam* di Cirebon Raya: Catatan pengamatan terhadap Islam dan demokrasi. Dalam E. Turmudi (Ed.), *Masyarakat Sipil Islam dalam Kehidupan Demokrasi Indonesia* (45–80). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.753.c929

E-ISBN: 978-623-8372-64-5

pada aksi 212 yang terjadi pada 2016, fenomena yang terjadi bukanlah semakin menguatnya konservatisme agama atau meningkatnya ekspresi ketidakadilan yang mendorong sikap intoleran, akan tetapi mobilisasi politik oleh elite yang dimungkinkan oleh sistem politik demokrasi dengan memanfaatkan aspirasi marjinalisasi umat Islam di Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidak tepatnya istilah tersebut, pertanyaannya adalah sejauh mana praktik keagamaan yang konservatif tersebut diikuti oleh menguatnya Islamisme atau Islam politik dan seberapa jauh praktik tersebut akan mengancam nilai-nilai *civil Islam* (sipil Islam)? Apabila kita merujuk pada Bassam Tibi (2016), Islam adalah agama, dasarnya adalah akhlak atau moralitas dan kesadaran ketuhanan atau spiritualitas. Tujuan yang ingin dicapainya adalah kebenaran dan keadaban. Moto perjuangannya adalah “*Rahmatan lil ‘alamiin*”, atau “rahmat bagi semesta alam”. Sementara itu, Islamisme adalah gerakan sosial politik, dasarnya adalah emosi sosial dan kesadaran kelompok. Tujuan yang ingin dicapainya adalah kemenangan dan kekuasaan politik. Moto perjuangannya adalah “*Izzul islam wal muslimin*”, atau “kejayaan Islam dan kaum muslimin”. Dalam penjelasan Bassam Tibi, ada kelompok orang yang tidak dapat membedakan antara Islam dan Islamisme, yaitu mereka yang mengidap islamofobia dan kelompok menganut Islamisme itu sendiri. Sementara itu, Esposito (2000) menjelaskan bahwa kelompok Islam politik dapat dikenali dari ciri-cirinya, misalnya memiliki pandangan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat secara komprehensif termasuk dalam ideologi politik. Sebagai akibatnya, kelompok ini menolak ideologi yang didasarkan atas nilai-nilai sekularisme dan materialisme Barat. Negara, bangsa, dan sistem politik demokrasi juga termasuk dua hal yang ditolak oleh kelompok Islam politik karena mendasarkan pada ideologi Barat. Islam politik menggunakan Islam sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial, bahkan termasuk dengan cara-cara kekerasan. Kelompok ini menghendaki kebangkitan atau *revivalisme* Islam melalui pembentukan organisasi yang ideologis, solid, militan, dan terlatih.

Jika kita bertolak dari dua pandangan di muka maka ciri-ciri Islam politik yang lebih sesuai dengan situasi di Indonesia adalah pandangan yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta upaya-upaya menegakkan kembali kejayaan Islam di masa lalu termasuk mengampanyekan Islam yang puritan. Jika menggunakan definisi yang lebih longgar, nampaknya gerakan Islam politik atau yang sering disebut dengan Islamisme masih cukup kuat di Cirebon. Studi sebelumnya mengenai gerakan Islam politik di Cirebon telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah studi Eko (2011) mengenai fenomena radikalisme di kalangan generasi muda di daerah tersebut. Artikelnya menjelaskan bahwa serangan bom bunuh diri di Masjid Adz-Dzikro Kompleks Mapolresta, Cirebon, pada 15 April 2011 lalu dilakukan oleh salah seorang yang masih remaja, Muhammad Syarif Astanagarif. Jumlah korban luka ledakan bom bunuh diri di masjid tersebut mencapai 28 orang, termasuk Kapolresta Cirebon AKBP Herukoco dan sejumlah perwira polisi lainnya.

Islamisme juga ditengarai oleh munculnya gerakan-gerakan yang bertujuan untuk membela Islam sebagai sebuah komunitas sosial dan politik dari ancaman kelompok agama lain. Hal tersebut dapat dilihat dalam munculnya Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (GAPAS). Menurut Eko (2011), ancaman dan intimidasi terhadap kelompok Kristen di kota ini dilakukan oleh GAPAS yang ingin menjaga akidah umat Islam dari upaya misionaris atau zending Nasrani dan memurnikan ajaran Islam dari aliran-aliran yang dianggap menyimpang, seperti Ahmadiyah dan Syiah.

Meskipun banyak pesantren besar dan sudah berusia puluhan tahun serta mengakar di masyarakat Kabupaten Cirebon, seperti Buntet, Babakan, dan Ciwaringin, tetapi pesantren-pesantren moderat ini berada di wilayah pinggir jika dilihat dari Kota Cirebon. Pengaruh dan kekuatan pesantren tersebut tidak cukup kuat sehingga menyebabkan kelompok GAPAS dan juga terjadinya aksi teror di Mapolresta Cirebon itu terjadi. Selain itu, daerah ini telah mengalami krisis figur tokoh Islam setelah meninggalnya Kiai Fuad Hasyim dari Ciwaringin

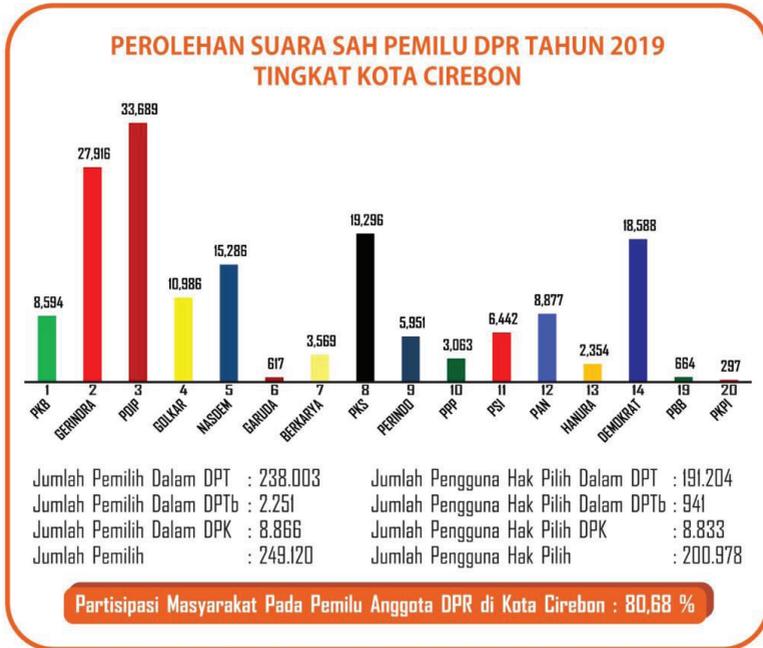
dan Kiai Abdullah Abbas yang dari Buntet yang karismatik dan sangat dihormati oleh masyarakat Muslim Cirebon Raya.

Berbeda dengan tulisan Eko (2011), tulisan ini bermaksud untuk menarasikan kembali konsepsi berpolitik menurut kelompok-kelompok komunitas Muslim dan menjelaskan mengapa hanya sebagian kecil dari mereka yang mendukung Islamisme dan sebagian besar menolaknya. Tulisan ini bersumber dari hasil observasi singkat dan wawancara terhadap beberapa tokoh masyarakat Muslim di Cirebon Raya terkait dengan konsepsi berpolitik ormas-ormas Islam.

A. Dinamika Politik di Cirebon

Salah satu ukuran untuk melihat dinamika politik adalah dengan melihat hasil pemilihan umum yang telah dilakukan beberapa kali sejak 1955. Jika dilihat dalam Pemilu 1955, Masyumi (1,8 juta suara) dan PNI (1,5 juta suara) merupakan dua partai politik terbesar, sedangkan PKI menempati urutan ketiga dengan 739 ribu suara dan NU urutan keempat 645 ribu suara. Secara umum, orientasi politik mendukung negara Islam atau gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) cukup signifikan di Provinsi Jawa Barat. Namun, jika kita melihat masing-masingnya, kabupaten dan kota tidak memiliki pola yang sama dengan realitas di provinsi. Misalnya, dalam Pemilu 1955 di Kota Cirebon, PKI memperoleh suara terbanyak (12.665 suara), disusul oleh PNI (9.536 suara), Masyumi (6.255 suara) dan NU (5.838 suara).

Berbeda dengan Kota Cirebon, suara hasil Pemilu 1955 di Kabupaten Cirebon dikuasai oleh Partai NU (104.520 suara), disusul oleh PKI (70.143 suara), PNI (63.720 suara), dan Masyumi (46.261 suara). Sedangkan di Kabupaten Kuningan dan Majalengka, PNI menempati suara teratas yang diikuti oleh Masyumi, PKI dan NU. Sementara itu, di Kabupaten Indramayu, Masyumi menempati suara terbanyak. Dengan demikian, Cirebon raya memiliki perbedaan demografi politik antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Jumlah pesantren yang cukup banyak di Kabupaten Cirebon membuat daerah ini menjadi basis Partai NU pada Pemilu 1955. Sementara itu, Kota Cirebon merupakan basis kuat PKI, sedangkan Kuningan dan Majalengka adalah PNI, dan Masyumi menang di Indramayu.



Sumber: KPU (2019)

Gambar 2.1 Perolehan Suara Sah Pemilu DPR 2019 Kota Cirebon

Dalam perpolitikan Kota Cirebon pada masa kini, dalam Pemilu DPR RI 2019, PDIP, Gerindra, dan Partai Demokrat meraih suara terbanyak. Sedangkan Partai Gerindra, PDIP, dan Partai Demokrat meraih jumlah suara terbanyak dalam Pemilu DPRD Kota 2019. Kemudian disusul oleh Partai Nasdem, Golkar, PKS, PAN, dan PKB. Dengan demikian, mayoritas anggota DPRD merupakan partai-partai nasionalis, seperti Gerindra, PDIP, Demokrat, Nasdem, dan Golkar. Sementara itu, partai-partai berbasis masa Islam, seperti PKS, PAN, dan PKB tidak menjadi partai menengah.



Sumber: KPU (2019)

Gambar 2.2 Perolehan Suara Sah Pemilu DPRD 2019 Kota Cirebon

Hal ini menunjukkan meskipun mayoritas warga Cirebon adalah Muslim, tetapi mereka adalah Muslim nasionalis yang cenderung sekuler atau memisahkan agama dengan politik sebagaimana penduduk Muslim lainnya di Pulau Jawa. Mayoritas penduduk di Kota Cirebon memiliki afiliasi, baik secara kultural atau organisasional dengan NU sehingga setiap calon wali kota selalu berasal dari latar belakang NU atau teridentifikasi dengan NU. Menurut M dalam wawancaranya, fenomena perpolitikan di Kota Cirebon adalah miniatur dari politik nasional yang sekuler dan dikuasai oleh oligarki politik (M, Wawancara, 21 November, 2020). Meskipun masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya memiliki kultur budaya keraton dan Islam, sedikit sekali parpol Islam memiliki kursi di DPRD. Hal ini disebabkan oleh kultur atau nilai-nilai ke-Islaman-an belum mendarah

daging di masyarakat, misalnya bahwa masyarakat belum mengikuti semua fatwa ulama. Kebanyakan praktik kultural di akar rumput dan elite masih diwarnai oleh kuatnya mistiskisme, sedangkan santri pada umumnya hanya mengikuti sikap dan perilaku kiai-nya.

Informan tersebut mengatakan bahwa kesalehan, ketaatan beragama, atau idealisme bukan aspek yang menentukan dalam politik di daerah ini. Memenangkan pemilihan kepala daerah banyak ditentukan oleh penguasaan sumber daya baik material maupun jaringan sosial. Misalnya, untuk menjadi walikota bukan hal yang sulit, cukup menguasai jumlah suara di 3 kecamatan dari 5 kecamatan. Oleh karena itu, dalam satu kecamatan, calon perlu menghitung berapa uang yang diperlukan untuk biaya politik. Pada pilkada terakhir Bamunas, pengusaha pemilik Grage Mall dan Grage Hotel serta masjid hijau dikalahkan oleh Nasirudin Asis Umar, seorang pengacara (Demokrat) yang berpasangan dengan Etty Herawati (Nasdem). Meskipun Partai Nasdem dan Demokrat memiliki posisi politik yang berbeda di tingkat nasional, yang pertama adalah pendukung rezim Joko Widodo, sedangkan yang kedua merupakan partai oposisi, namun di Cirebon keduanya dapat membentuk suatu aliansi politik.

Dalam setiap pemilihan umum baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota, pesantren selalu diperhitungkan secara politik. Kekuatan pesantren adalah pada jaringan alumninya bukan pada jumlah siswanya sehingga dapat digunakan sebagai modal dalam kontestasi politik. Politik yang terjadi adalah transaksional, yaitu jika ada calon wali kota/bupati/gubernur yang potensial untuk menang, partai politik atau kelompok kepentingan akan mengeluarkan dana untuk membiayai kampanye calon tersebut. Setelah calon tersebut menang dan terpilih menjadi bupati, misalnya maka dia akan mengembalikan dana kampanye dengan memberikan konsesi kepada partai politik atau kelompok kepentingan yang mendukungnya tadi.

Berbeda dengan Kota Cirebon, pada DPRD Kabupaten Cirebon hasil Pemilu 2019 jumlah anggota dari PKB menempati suara paling besar, yaitu 10 orang, disusul oleh PDIP (8 orang), Golkar (7 orang),

Gerindra (7 orang), Nasdem (7 orang), PKS (6 orang), Demokrat (4 orang), dan Hanura (1 orang). Jumlah suara PKB yang signifikan diduga terkait dengan banyaknya pondok pesantren besar di daerah ini, seperti Buntet dan Ciwaringin. Mereka memiliki jaringan alumni dengan sejumlah pesantren lainnya dan kebanyakan berada di daerah perdesaan yang memiliki populasi yang sangat besar (M, Wawancara, 21 November, 2020).

Sementara itu, di Kabupaten Kuningan, PDIP meraih suara terbanyak dan memiliki wakil paling banyak di DPRD Kuningan, yaitu 9 orang. Disusul oleh PKS (7 orang), Gerindra (7 orang), PKB (6 orang), Golkar (5 orang), PAN (5 orang), Demokrat (5 orang), PPP (4 orang), Nasdem (1 orang), dan PBB (1 orang) (DPRD Kabupaten Kuningan, 2021). Basis suara partai-partai politik Islam, seperti PKS, PAN, PBB berpusat di Kecamatan Cilimus, Jalaksana, Kuningan, dan Dharma. Selama ini, bupati paling banyak juga berasal dari PDIP, salah satunya yang paling terkenal karena membangun jalan aspal sampai ke pelosok-pelosok kampung, adalah Aang Hamid Sugandi (menjabat pada 2003–2008 dan 2008–2013). Aang Hamid Sugandi kemudian diteruskan oleh istrinya, Utje Hamid Suganda (2013–2016) pada periode selanjutnya dan sekarang di periode keempat PDIP diteruskan oleh Acep Purnama.

B. Konsep dan Praktik Berpolitik

Bagian ini akan membahas mengenai pandangan beberapa informan dan studi-studi terkait yang berkaitan dengan konsep dan praktik berpolitik gerakan-gerakan Islam di Cirebon dan sekitarnya. Berikut ini, kategori yang digunakan mengikuti istilah yang selama ini populer dalam kajian Islam, yaitu 'Islam politik', yang merujuk pada organisasi masyarakat sipil Islam yang berjuang untuk mencapai kejayaan dan kemenangan Islam dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kategori yang lain adalah 'Islam moderat', merujuk pada organisasi masyarakat sipil Islam yang lebih berorientasi pada Islamisasi budaya masyarakat daripada menguasai politik formal.

1. Islam Politik di Cirebon

Salah seorang informan yang diwawancarai dalam kajian ini, salah seorang Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Cirebon, Y mengatakan bahwa Islamisme di Cirebon tidak berbeda dengan pada tingkat nasional, yakni lebih banyak dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin yang selanjutnya disingkat dengan IM. Menurutnya, IM di Indonesia terdiri dari Harakat Assidiyah (garis keras), yaitu Abu Bakar Baasyir dan Tarbiyah (jalur pendidikan), yaitu Jafar Umar Thalib (JUT). Informasi yang diberikan Ketua PCNU ini bertolak belakang dengan tulisan Maulana (2019) yang menjelaskan bahwa JUT pernah mengagumi gerakan IM. Namun, perjumpaannya dengan para pendakwah salaf membuatnya berubah memusuhi gerakan IM. Salafy, nama majalah yang dipimpinnya, menjadi mercusuar dari dakwah salaf dan tidak memiliki keterkaitan dengan gerakan IM (Maulana, 2019).

Pada 1928, IM berdiri di Ismailiah, Mesir, untuk merespons kemerosotan politik umat Islam pasca runtuhnya Dinasti Usmani, kekalifahan Islam terakhir, dengan menawarkan solusi penyatuan kaum muslimin dan pembentukan negara berbasis Islam yang kafah. Dalam perkembangannya, para pemimpin dan penganut IM banyak mengalami persekusi karena dianggap ingin mengganti Mesir yang nasionalis dan demokratis menjadi negara Islam. Namun, gerakan ini justru mampu tumbuh dan berkembang hingga ke luar Mesir. Melalui para mahasiswa dari negara-negara yang penduduknya beragama Islam yang sedang belajar di Timur Tengah, pemikiran IM berkembang melalui indoktrinasi yang sistematis dan rapi (Makhsun, 2020).

Dalam panggung politik Indonesia, IM dapat dilihat pada Partai Keadilan atau sekarang bernama Partai Keadilan Sosial (PKS). M. Imdadun Rahmat dalam buku *Ideologi politik PKS: Dari masjid kampus ke gedung parlemen* (2008) mengatakan bahwa PKS menggunakan IM sebagai referensi utama gerakan politiknya, termasuk mengadopsi pemikiran Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb, metode dakwahnya, dan strategi meraih dukungan massa. Menurut Ketua PCNU Kota Cirebon, Sayap IM di kota ini dapat dilihat pada Ikatan

Dai Indonesia (IKADI). Namun, sayangnya klaim ini belum didukung dengan temuan-temuan empiris di lapangan selama observasi. Mungkin saja kebanyakan anggota IKADI di kota ini banyak yang menjadi simpatisan atau anggota PKS. Namun, sebuah sumber di media sosial menyebutkan bahwa “IKADI berkepentingan agar Islam berkembang di Indonesia adalah yang *rahmatan lil alamiin*. Islam yang dampaknya langsung terasa bagi semua masyarakat Indonesia sebagai rahmat.” (Rasi, 2018).

Islamisme IM menurut pandangan Ketua PCNU berawal dari sejarah terbunuhnya Kalifah Ali bin Abi Thalib. Pembunuh Khalifah Ali adalah bukan orang kafir, tetapi orang yang saleh luar biasa, hafiz Al-Qur’an, rajin salat malam dan puasa sunah, yang bernama Abdul Rahman bin Mulzam. Ia berpendapat bahwa Ali dibunuh karena Ali selalu menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah yang tidak diatur dalam Al-Qur’an, di mana diyakini olehnya ‘*barang siapa yang tidak menggunakan hukum Allah maka dia termasuk orang yang dholim, fasiq, dan halal darahnya*’. Penafsiran terhadap jihad yang salah sudah dimulai oleh Abdul Rahman bin Mulzam. Oleh karena itu, kalangan Muslim terutama nahdyyin berdakwah agar kita tidak menganut penafsiran Islam seperti di atas. Pesan yang disampaikan adalah konsepsi dan praktik politik kelompok Islam moderat pada umumnya bersifat kontekstual dan mengedepankan musyawarah dan kerukunan antarumat beragama. Menurut Prof. Endang Turmudi—mantan Sekjen PBNU—pandangan ini *mainstream* di kalangan NU pada masa periode kepemimpinan K.H. Abdurrahman Wahid dan sesudahnya. Namun, konsepsi ini belum menjadi dominan semasa Partai NU pada 1952–1959 yang bersama-sama Partai Masyumi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara (Endang Turmudi, wawancara, 31 Maret, 2021).

Adapun Front Pembela Islam (FPI), menurut banyak informan, jumlah pendukungnya tidak signifikan di Kota Cirebon karena basis kultural NU yang sangat kuat sehingga masyarakat memiliki pertimbangan untuk tidak mendirikan atau bergabung dengan FPI (MA, wawancara, 21 November, 2020). Namun, meskipun pendukung

FPI dan HTI tidak signifikan di kota ini, Ketua PCNU mengklaim adanya jaringan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang cukup kuat walaupun tidak dapat dilihat secara fisik, baik anggota-anggotanya maupun kegiatannya. Pengaruh MMI dapat dilihat dalam, misalnya, aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Hubungan Industrial Pancasila (RUU HIP) yang pernyataannya dibacakan di DPRD Kota Cirebon. Dalam pernyataan tersebut, terdapat pernyataan mendukung khilafah. Oleh karena itu, PCNU Kota Cirebon melaporkan tiga orang anggota DPRD kota yang menerima para demonstran. Namun, Kapolres berusaha mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap ketiga tersangka tersebut. PCNU mengangkat kasus ini ke Polda Jabar dan mengusulkan menambah tiga saksi ahli selain hukum pidana dan agama.

Menurut Ketua PCNU Kota Cirebon, pendukung dari gerakan MMI adalah Pesantren Al-Manar Kota Cirebon. Sumber dari media sosial daring menunjukkan bahwa Gerakan Penegak Syariat dan Al-Manar melakukan demonstrasi yang menuntut pembubaran Nurul Quran Weru, Cirebon pada 2015, yang dianggap sesat. Hal ini mengakibatkan sekitar 90 santri perempuan merasa ketakutan dan kegiatan pesantren menjadi lumpuh (Omen, 2015). Sebelumnya, keduanya juga berupaya menutup Yayasan Al-Magfurlah Klayan, Cirebon, yang dituduh mengajarkan aliran sesat sehingga harus menghentikan kegiatannya. Menyikapi hal tersebut, pada 2015, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Cirebon (KBNU Cirebon) berkumpul di pondok pesantren Salafiyah, Desa Bode Lor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, mengeluarkan pernyataan sikap agar Al-Manar dan GAPAS menghentikan aksi kekerasannya untuk menutup Pesantren Nurul Quran (Omen, 2015).

Al-Manar kemudian juga dituduh di media sosial sebagai pendukung Gerakan Islamic State in Iraq and Syiriah (ISIS) karena memiliki simbol-simbol yang mirip. Oleh karena itu, Al-Manar menjelaskan melalui konferensi pers pada 11 Agustus 2014 yang di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut (Panjimas.com, 2014):

- 1) Pertama, Al-Manar merupakan kepanjangan dari Aliansi Masyarakat Nahi Munkar, gabungan yang bersifat terbuka dari berbagai elemen masyarakat, baik secara atas nama perorangan, Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM), kelompok atau majelis, dan lembaga atau ormas, untuk menegakkan kewajiban ibadah nahi mungkar di lingkungan masyarakat.
- 2) Kedua, Al-Manar terbentuk sejak Oktober 2011 oleh beberapa aktivis amal nahi mungkar di Cirebon, yang lebih dahulu berdiri sebelum deklarasi ISIS di Timur Tengah dan memiliki tujuan yang berbeda dengan ISIS.
- 3) Ketiga, bendera ataupun panji-panji hitam maupun putih '*Laa Ilaaha Illallah, Muhammad Rasulullah*' bukan hanya bendera ISIS, tetapi juga merupakan bendera Rasulullah. Bendera ataupun panji-panji tersebut merupakan simbol Islam dan muslimin, simbol kehormatan Islam dan muslimin, dan termasuk pusaka wasiat warisan Rasulullah, seperti mushaf Al-Qur'an, Ka'bah, azan, dan masjid. Argumentasinya, setiap muslim wajib dan berhak untuk membela simbol-simbol Islam tersebut, memuliakannya, mengajarkannya, dan menjaga kehormatannya.
- 4) Keempat, merupakan kemungkaran serta fitnah jahat bagi yang menyatakan dan memperlakukan simbol-simbol kehormatan Islam, seperti bendera tauhid tersebut dengan stigma dan perlakuan sebagai bukti kejahatan.
- 5) Kelima, adanya aktivis atau mantan aktivis Al-Manar, para simpatisan, baik pribadi atau kelompok, yang berangkat ke luar negeri baik ke Suriah, Palestina, Yaman, Saudi, Mesir atau manapun, untuk keperluan keluarganya, pendidikan agama, ekonomi, ataupun sosial kemanusiaan yang dilakukan atas nama pribadi.
- 6) Keenam, adanya kegiatan Al-Manar membina pemudanya untuk olahraga dan baris-berbaris adalah sebagai upaya menghidupkan syiar sifat "*Basthotan Fil Ilmi wal Jismi*" (kuat dalam ilmu dan jasmani) serta syariat membina ketertiban, kedisiplinan, kerapian barisan yang diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga

mereka dapat mengatasi dan mengantisipasi brutalisme para pelaku kejahatan.

- 7) Ketujuh, tudingan dan tuduhan bahwa selama ini dalam amal kegiatan nahi mungkarnya Al-Manar bersikap anarkis serta membuat resah masyarakat, menyampaikan pernyataan fitnah sarat indikasi kebencian subjektif dari kenyataan. Hingga saat ini banyak masyarakat yang berterima kasih atas dampak menu-runnya kriminalitas karena berkurangnya peredaran miras dan narkoba.
- 8) Kedelapan, Khilafah Islamiyyah merupakan sistem kepemimpinan politik dan pranata kehidupan dunia secara Islami Kaffah dalam segala bidang peradabannya. Berkaitan dengan hal Khilafah ini maka Al-Manar berpendapat sebagaimana banyak ulama bahwa deklarasi Khilafah ISIS belum memenuhi syarat, prosedur, dan adab yang mencukupi sehingga Al-Manar tidak menyetujui ISIS.

Sementara itu, GAPAS merupakan singkatan dari Gerakan Penegak Syariat yang diketuai oleh Andi Mulya. Aksi yang dilakukan oleh GAPAS mencakup pengusulan Perda Antimiras Kota Cirebon, pengusulan penghapusan larangan memakai jilbab di Geeta International School, serta *sweeping* dan penggerebekan terhadap kelompok yang dianggap sesat. Sebuah sumber di media sosial, IslamPres.com menyebutkan bahwa Andi Mulya ketua Ormas Al-Manar dan anggota Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) bersama Agung Nur Alam, Ketua Jamaah Ansorut Syariah (JAS) Cirebon ditangkap Polisi pada 2019 karena tindak pidana konten media sosial yang provokatif, bukan terorisme (Ciremaityday, 2019). Agung Nur Alam berasal dari Kota Cirebon dan berusia 33 tahun pada saat ditangkap.

Temuan ini mendukung tulisan Suhanah (2014) yang mengatakan bahwa hampir semua gerakan keagamaan Islam ‘radikal’ berupaya untuk menegakkan syariat Islam dan amar makruf nahi mungkar. Suhanah (2014) mencontohkan bahwa Gerakan Pagar Aqidah (GARDAH), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), dan Front Pembela Islam (FPI) mengatakan “kami hanya menginginkan masyarakat yang

Islami dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar". Ia menyebutkan bahwa ormas-ormas ini menekankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersyariat.

Ketua PCNU mengeklaim bahwa baik MMI maupun GAPAS memiliki afiliasi dengan Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. Namun, informasi ini tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan lebih menunjukkan adanya kontestasi antara elite PCNU dan elite pengelola Masjid Raya Kota Cirebon. Observasi penulis di Masjid Raya Kota Cirebon menunjukkan bahwa materi kotbahnya sangat jauh dari topik Islam politik atau terkait dengan kejayaan dan kemenangan Islam. Bahkan, mengajak umat Islam untuk menghindari penggunaan nilai-nilai kekerasan meskipun ikut merasa emosional dengan peristiwa penayangan kartun yang menghina Nabi Muhammad di Majalah Charlie Hebdo di Prancis.

Namun sayangnya, penelitian ini tidak sempat melakukan wawancara dengan Pimpinan PKS Kota Cirebon, namun dengan salah seorang dosen IAIN Syekh Nurjati (Wawancara dengan MA, 21 November 2020), yang merupakan aktivis gerakan tarbiyah di Cirebon pada 1998. Informan ini pernah mengikuti kursus bahasa Arab di Universitas Ibnu Suud Libya dan mendapatkan *fellowship* kebudayaan dari Universitas Ulumul Quran Madinah. Pada masa mudanya, pernah aktif dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) IAIN Cirebon dan bergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Cirebon.

Informan ini, MA, juga menyampaikan bahwa pada 2017, pernah mengundang anggota DPR dan pemimpin PKS (FH) untuk berceramah di aula IAIN Cirebon. Namun, beberapa organisasi kemasyarakatan Islam di kota ini menekannya untuk membubarkan acara tersebut. Setelah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden pada tahun 2014, MA meninggalkan dunia politik karena praktik politik yang digunakan bersifat 'kasar' dalam arti menggunakan segala cara termasuk persekusi terhadap oposisi dan membungkam kebebasan berekspresi dari kelompok yang kritis terhadap rezim. MA kemudian memilih mengambil gerakan kultural dengan mengembangkan

sekolah dasar peradaban global yang memfokuskan pada hafiz Al-Qur'an anak kelas VI SD.

Konsep berpolitik menurut Islam dalam pandangannya adalah praktik berpolitik ketika tidak didasari oleh motivasi dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan materialisme. Ulama atau kiai yang berpolitik seharusnya tidak didasarkan atas kebutuhan materiil, melainkan didasarkan atas idealisme dan nilai-nilai Islam, yaitu kebenaran dan moralitas serta untuk kemaslahatan umat. Contohnya adalah Buya Hamka saat siap dipenjara ketika berani mengkritik ketidakadilan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Menurutnya, dalam Islam kita dapat mempelajari sejarah para imam. Imam Hanafi mengatakan bahwa rejeki dapat dicapai melalui tawakal, sedangkan Imam Syafii mengatakan bahwa rejeki dapat dicari dengan ikhtiar. Pada waktu itu, Imam Syafii membawakan makanan pada Imam Hanafi, dan ia mengatakan rejeki dapat dicapai dengan tawakal melalui ikhtiar.

MA menceritakan, pada waktu Khalifah Abu Bakar berkuasa, Umar mengatakan bahwa khalifah harus berhenti berdagang dan memusatkan pekerjaannya pada politik pemerintahan. Abu Bakar mempertanyakan bagaimana dia memberi nafkah pada keluarganya. Dalam menjawab hal tersebut, Umar mengusulkan agar khalifah digaji dengan menggunakan baitulmal agar khalifah konsentrasi mengurus pemerintahan dan masyarakat. Juga menurut MA, Khalifah Umar bin Abdul Azis mengganti semua harta yang diambil oleh para khalifah terdahulu. Sebagai akibatnya, pendapatan negara menjadi berlipat dan pemberian semua zakat menjadi membingungkan karena tidak ada orang yang miskin. Khalifah kemudian membeli bibit pohon dan ditaburkan di pegunungan agar tumbuh. Jika umat Islam masih menggunakan politik berdasarkan materi, mereka dengan mudah akan dipecah belah dan diadu domba sesama umat Islam, dan selamanya tidak akan bersatu.

Kebanyakan kelompok Islam politik berprinsip bahwa demokrasi pada intinya adalah musyawarah, walaupun dilaksanakan secara tidak langsung. Oleh karena itu, demokrasi masih sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam dan dapat diterima. Kepemimpinan dan politik

untuk kemasalahatan umat dan moralitas menjadi lebih penting daripada demokrasi itu sendiri. Dinasti Umayyah hanya bertahan sampai 92 tahun dibanding Abbasiyah yang mencapai 600 tahun karena praktik politik yang kurang Islami. Misalnya, suksesi tidak lancar di mana raja yang berumur 12 tahun diangkat oleh Umayyah sehingga ia hanya menjadi boneka dari segelintir penguasa zalim.

Sekarang ini, tokoh sipil Islam yang kritis di Cirebon Raya yang dianggap cukup berpengaruh adalah dari Pesantren Al Bahjah yang diketuai oleh Yahya Zainul Maarif atau dipanggil Buya Yahya, seorang ulama muda, kelahiran 1973 dan lulusan dari lembaga pendidikan Islam di Yaman. Salah satu daya tariknya adalah ia memiliki sikap yang tegas dan kritis terhadap pemerintah seperti Ustad Abdul Somad. Setiap hari Minggu, Buya Yahya mengadakan pengajian rutin di mana para pesertanya mengantri parkir sepanjang 2 km; dengan antrian yang dipenuhi oleh mobil angkutan yang membawa masyarakat dari kampung-kampung ke pesantrennya.

Menurut keterangan dalam laman resminya, nama “Al-Bahjah” memiliki makna cahaya atau kemilau sinar. Pesantren ini diharapkan sesuai dengan namanya, yakni menjadi cahaya penerang bagi umat Islam. Kedatangan Buya Yahya ke Cirebon pada 2006 adalah untuk menjalankan misi Universitas Al-Ahgaff Yaman dalam rangka mendirikan kampus Universitas Al-Ahgaff di Indonesia. Namun, program tersebut gagal dan tidak dilanjutkan. Setelah itu, Buya Yahya meminta izin pada gurunya, Al-Habib Abdullah Bin Muhammad Baharun, untuk memulai dakwah di Cirebon. Pada 2007, Buya Yahya membuka majelis taklim di Kota Cirebon di beberapa masjid besar di Kota Cirebon dan sekitarnya. Upaya ini berkembang sehingga datangnya permintaan dari beberapa kelompok komunitas muslim untuk menyekolahkan anak-anaknya di tempat Buya Yahya.

Setelah Buya Yahya memiliki satu tempat tinggal lagi selain rumahnya sendiri, yaitu sebuah rumah kontrakan di daerah Karang Jalak Cirebon, beliau mulai menerima beberapa santri. Satu tahun kemudian, rumah tersebut semakin padat dengan santri. Oleh karena itu, para sahabat beliau mengupayakan tempat yang lebih ideal sebagai

Lembaga Pengembangan Dakwah (LPD) Al-Bahjah, termasuk di dalamnya adalah Pondok Pesantren Al-Bahjah, yakni di Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, sebuah lokasi pesantren di tengah sawah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Setelah dua tahun, tepatnya Januari 2010, LPD Al-Bahjah beserta pesantren putra dan putri diresmikan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun dari Yaman (Yayasan Al-Bahjah Cirebon, t.t.).

Buya juga mengajak debat pimpinan pesantren Assunah (*Salafi/Wahabi*) yang dipimpin Ustad Toharoh. Persesteraan antara NU dan *Salafi/Wahabi* bermuara pada tradisi ritual selamat orang meninggal yang dilembagakan dan dikomodifikasi. Keduanya tetap berpegang pada pendiriannya masing-masing dengan referensi kitab-kitab yang dibaca. Kemudian, keduanya bersalaman dan berpelukan dan menyerahkan kebenaran pada pengikutnya. Demikian juga, Buya Yahya pernah berdebat dengan habib dari Cirebon, dan setelah itu mereka makan bersama di rumah Buya Yahya dan di rumah habib.

Pesantren Assunah Cirebon di Jalan Kali Tanjung beraliran *salafi non-jihadist*. Pesertanya menggunakan cadar dan celana di atas mata kaki dan berpemikiran Islam konservatif. Pelaku bom di Masjid Polres Cirebon tahun 2011 adalah Sarif Astanagarif, murid SMA 4 Cirebon di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Ia pernah menjadi anggota Rohis di SMA 4 dan pernah mendapatkan tutorial dari Pesantren Assunah Kota Cirebon. Memang pesantren ini mengajarkan *salafi non-jihadist*, namun cenderung mengarahkan umat berpikir dikotomis, yaitu benar-salah, hitam-putih, menjadi mudah ditransformasikan ke gerakan kekerasan.

Salah seorang informan (N, wawancara, 20 November, 2020) mengemukakan bahwa ketika isu terorisme muncul yang dihubungkan dengan cadar dan *salafi*, mereka bersifat akomodatif dengan rutin mengundang para pembicara dari Polres, Kodim, dan BIN sehingga tidak dicurigai. Dalam setiap pilkada, setiap calon juga berkunjung ke Assunah dan kemudian diberitakan di TV serta media massa. Walaupun *salafi non-jihadist* tidak berpolitik, mereka melakukan pendekatan terhadap siapapun kelompok yang berkuasa agar terus eksis.

Menurut keterangan resmi dalam lamannya, Yayasan Assunah berdiri pada 1993, diinisiasi oleh sesepuh dakwah di Cirebon, seperti Ustaz Ali Hijrah (alm.), Agus Setiawan (alm.), dan Andi Sutoro (alm.). Yayasan ini bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Yayasan ini memiliki visi membentuk masyarakat yang taat beribadah kepada Allah taala berdasarkan Al-Qur'an dan sunah, sesuai dengan pemahaman para Salaf As-Shalih. Pada awal berdiri, kegiatan yayasan ini hanya berkisar di halaqah-halaqah taklim dan pengajian rutin. Selain itu, ada pula kajian bahasa arab yang mulai diselenggarakan di beberapa tempat. Dalam perkembangannya, yayasan telah mendirikan TKIT pada 1995, SDIT pada 1996, dan MTs Assunah pada 2004 serta MA Assunah pada 2009. Yayasan ini juga memiliki pendidikan kaderisasi dari Program I'dad. Adapun program dakwah yang telah dilakukan Yayasan Assunah adalah Kajian Ilmiah Islam, Konsultasi Agama, Penyebaran Khatib Jumat dan Dai untuk pengajian, Buka Puasa Bersama, Pesantren Mahasiswa (PASMA), Radio Dakwah KITA FM dan masih banyak program lainnya. Adapun kegiatan sosial yang dimiliki di antaranya adalah penyembelihan hewan qurban, khitanan massal, donor darah dan baksos, penyaluran bantuan bencana alam, dan juga pembagian buku-buku keislaman untuk perpustakaan (Yayasan Assunah, t.t.).

Informan lainnya, MS, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon 2008–2010 (MS, wawancara, 23 November, 2020) menguatkan pandangan konsep politik yang tidak bermateri. Ia mengatakan dalam wawancaranya bahwa konsepsi politik umat Islam seharusnya berdasar pada prinsip antiriba, ekonomi Islam, dan politik persatuan Islam agar dapat mencapai kemenangan dan kejayaan Islam, seperti pada masa khilafah dan Cordoba. Umat Islam selalu kalah dalam politik di antara Blok Komunis dan Blok Barat karena tidak dapat mengatasi permasalahan dirinya sendiri, atau mudah dipecah-pecah oleh kepentingan. Persatuan politik Islam dalam ekonomi dan politik diperlukan pada saat ini untuk kebangkitan, kemenangan, dan kejayaan Islam.

Dari beberapa wawancara terhadap penggiat organisasi masyarakat sipil Islam yang selama ini dikenal sebagai “Islam politik” di Cirebon Raya dan literatur, dapat diketahui bahwa sejumlah sipil Islam masih memiliki orientasi untuk mewujudkan Indonesia yang bersyariat. Meskipun secara kuantitas tidak banyak jumlahnya, mereka selalu dikenali dengan isu-isunya, seperti pemurnian Islam dan syariat Islam. Kelompok ini harus dibedakan dengan gerakan teroris, seperti Jemaah Ansharut Daulah (JAD), Jemaah Ansharut Tauhid (JAT), Al-Qaida, dan ISIS yang memiliki orientasi khilafah Islamiyah dan metode kekerasan. Menurut analisis Amin Mudzakkir, peneliti politik Islam nusantara, kelompok Islam politik ini sebenarnya masih berorientasi pada negara dan bangsa (Indonesia) namun memiliki aspirasi suatu negara yang bersyariat. Sementara itu, menurut Prof. Endang Turmudi, kelompok sipil Islam ini akan selalu ada karena berangkat dari etika dan nilai dalam Islam yang ingin memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjadi lebih baik dan lebih bermoral. Hal ini selalu muncul dalam setiap periode sejarah dengan bentuk yang berbeda-beda karena Islam tidak memisahkan kehidupan politik dengan nilai-nilai etis keagamaan.

2. Konsep dan Praktik Berpolitik Komunitas NU

Menurut keterangan PCNU Kota Cirebon, konsep politik PCNU adalah mewujudkan politik yang *akhlakul kharimah*. Politik yang berakhlak dan santun, seperti menyatakan protes melalui jalur hukum dan tidak melakukan demonstrasi di jalanan. Politik yang *akhlakul kharimah* diakui akan menghapus kesenjangan dan mencapai kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, kontestasi antara PCNU dan kelompok-kelompok Islam terasa cukup keras di kota ini dalam bentuk saling membatalkan acara satu sama lain.

Kontestasi elite PCNU dengan kelompok yang diklaim Islamis tersebut berupa fenomena saling memprotes acara pengajian yang pembicaraanya bertentangan dengan aliran keagamaan mereka. Misalnya, pada saat PCNU Kota Cirebon ingin mengundang K.H. Said Agil Siraj, Ketua PBNU, dalam cara haul Sayidina Hasan dan

Husin, terdapat laporan ke Polres bahwa K.H. Said mendukung Syiah. Namun, setelah negosiasi akhirnya K.H. Said Agil tetap diizinkan memberikan ceramah di Cirebon. Sebaliknya, pada saat MMI mengundang Ustaz Bakhtiar Nasir (BN) ke Cirebon melalui Masjid Attaqwa dalam acara pengajian, PCNU menolak dan melaporkan ke Polres. Wali kota turut mempertanyakan mengapa BN ditolak, sedangkan masih sesama Islam dan masih sama-sama mengakui nabi. PCNU curiga orang-orang dari Masjid Attaqwa telah memengaruhi wali kota dengan mengklaim bahwa jika BN mengisi pengajian di Kota Cirebon, 36.000 suara akan memilihnya dalam pilkada yang akan datang. Namun, setelah negosiasi, akhirnya BN dibatalkan dan diganti dengan Prof. Dr. Nasruddin Umar, imam besar Masjid Istiqlal. Selanjutnya, pada waktu Yayasan Al-Bagja mengundang Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam pengajiannya, PCNU kembali menolak. Pesantren ini dipimpin oleh Buya Yahya Zaenul Maarif, suatu pesantren yang amaliahnya NU, tetapi harakat dan fikrahnya bukan NU. Namun, setelah negosiasi, akhirnya UAS diijinkan mengisi pengajian yang terbatas dilaksanakan di tempat tertutup dengan alasan Covid-19.

a. Pesantren Buntet

Berbicara sipil Islam moderat tidak hanya dibatasi oleh organisasi NU secara struktural. Penulis juga melakukan observasi di sejumlah pondok pesantren yang menjadi fondasi organisasi NU di Cirebon raya. Berbicara NU di daerah ini tidak dapat dilepaskan dari Pesantren Buntet. Amak Abqari, sebagaimana dikutip oleh Rindanah (2013), menceritakan bahwa seorang Mufti Besar Kesultanan Kanoman, K.H. Muqoyyim atau dikenal dengan nama Mbah Muqoyyim memiliki sikap nonkooperatif terhadap Belanda sehingga memilih mengajar di tengah masyarakat. Dia kemudian mendirikan Pondok Pesantren Buntet yang sekarang ini menempati Desa Mertapada Kulon, Arjawinangun. Dalam perkembangannya, pesantrennya meluas sehingga mencakup Desa Buntet, Desa Mertapada Kulon, Desa Sida Mulya, dan Desa Munjul. Berbeda dengan desa-desa lain di Cirebon, desa-desa di sekitar Pesantren Buntet baru terbentuk setelah Pesantren

Buntet didirikan. Hal ini menandai betapa besarnya pengaruh kultural Pesantren ini terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sampai sekarang, pesantren ini tetap mempertahankan tradisi haul yang telah berlangsung sejak masa kolonial dengan berbagai penyesuaian pada masa kini (Maknunah & Hasim, 2019).

Jamil (2010) dalam tulisannya menjelaskan bahwa kiai sepuh Pesantren Buntet secara turun-temurun adalah sebagai berikut:

- 1) K.H. Muta'ad (1785–1852).
- 2) K.H. Abdul Jamil (1842–1919).
- 3) K.H. Abbas (1879–1946).
- 4) K.H. Mustahdi Abbas (1946–1975).
- 5) K.H. Mustamid Abbas (1975–1988).
- 6) K.H. Abdullah Abbas (1922–2008).
- 7) K.H. Nahduddin Abbas (2008–sekarang).

Selain mengikuti pengajian di pondok pesantren, para santri melakukan studi di sekolah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah. Dengan demikian, alumni Pesantren Buntet memiliki ijazah yang diakui pemerintah dan dapat digunakan untuk meneruskan studi di perguruan tinggi. Adapun sekolah formal yang dikelola di pesantren ini meliputi semua jenjang, yaitu TK, Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD), Madrasah Sanawiah (setingkat SLTP), Madrasah Aliyah (setingkat SLTA), dan Akademi Perawat (Akper). Selain itu, Pesantren Buntet memiliki lembaga-lembaga pelatihan, seperti Lembaga Bahasa dan Keterampilan (LBK) yang mengajarkan beberapa program kursus seperti komputer dan bahasa Inggris.

Konsep berpolitik Pesantren Buntet di Kabupaten Cirebon dijelaskan oleh SY (SY, wawancara, 20 November, 2020), pengasuh Pesantren Attarbiyatul Wathoniyah (PATWA) Mertapada, dan termasuk salah satu keturunan Kiai Akyas. Dalam wawancaranya, ia mengatakan bahwa politik NU adalah politik antikolonial karena Pondok Buntet lahir sebagai perlawanan terhadap Belanda yang mencampuri Keraton Kanoman. Sekarang ini, politik pesantren adalah pesantren yang mengendalikan permainan politik sekuler dan bukan sebaliknya, sistem politik sekuler yang mengendalikan pesantren. Sebagai salah

satu strateginya menurut beliau adalah dengan membebaskan urusan politik dari pondok pesantren. Guest House Buntet Pesantren akan selalu terbuka pada siapa pun politisi, capres, dan parpol yang datang ke pesantren, kecuali PKS. Partai ini diakui membawa ideologi yang berbeda dengan haluan politik NU yang *ahlusunnah waljamaah*, dan menolak *transnationalism*. Namun, jika ada parpol atau capres yang langsung datang ke salah satu kiai, ia tidak mewakili pondok, tetapi mewakili pribadinya. Hampir semua calon presiden, dari Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo pernah berkunjung ke Guest House Buntet Pesantren.

SY (SY, wawancara, 20 November, 2020) mengatakan bahwa sejarah panjang pengalaman dan rahim politik yang begitu kuat melekat pada Pondok Pesantren Buntet berimbas pada kematangan dan kelincahannya dalam merespons segala bentuk perubahan situasi politik multipartai di negeri ini. Politik bagi Pesantren Buntet bukanlah sesuatu yang menakutkan dan harus di jauhi, tetapi sesuatu yang “biasa-biasa” saja. Sementara itu, pesantren lain di luar Buntet, menurut SY, melihat politik sebagai bidang yang sakral. Menurut informan ini politik harus bisa dijinakkan dan dimanfaatkan, dan bukan sebaliknya. Dia melihat terdapatnya pondok pesantren yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik para politisi. “Daripada mereka (politisi) memanfaatkan kita, memusingkan kita, lebih baik kita memanfaatkan mereka, memusingkan mereka. Daripada ditinggalkan dan dimanfaatkan oleh partai, lebih baik membingungkan dan memanfaatkan partai untuk kemashlahatan umat”, demikian disampaikan SY.

Syatori (2018) mengatakan bahwa kehadiran para pejabat dan tokoh politik ke Pesantren Buntet dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya dan menggembirakan karena adanya pemikiran bahwa jangan sampai ulama yang mendekati para politisi atau pemerintah, tapi selayaknya pemerintah yang turun menemui para kiai. Acara tersebut biasanya dilakukan pada saat haul kiai K.H. Abas. Selain untuk menjaga keharmonisan antara pemerintah dan pesantren, kunjungan tersebut dimaknai sebagai prestise karena pesantren

diperhatikan dan dianggap mendapatkan berkah dan kesempatan untuk kemajuan pesantren. Syatori (2018) mengemukakan bahwa keterlibatan kiai dalam politik merupakan artikulasi sosial kiai dalam mendorong perubahan kehidupan sosial-politik ke arah yang lebih baik. Misalnya, ketika terdapat moral politik yang korup dalam menjalankan fungsi kenegaraan, kiai terpanggil dan wajib terlibat dalam kancah perpolitikan untuk memperbaiki kondisi negara yang tidak stabil tersebut. Dengan kata lain, arah perkembangan kehidupan politik yang tidak lagi mengedepankan nilai-nilai dan *akhlaqul karimah* menjadi landasan bagi keterlibatan kiai. Menurutnya, keterlibatan kiai dalam politik adalah fardu kifayah karena politik adalah bagian dari dinamika kehidupan yang tidak bisa ditolak kehadirannya.

Namun demikian, politik kiai bukan berorientasi pada kekuasaan, tetapi politik moral, yakni menanamkan nilai-nilai moral untuk pencerdasan dan penguatan umat dan masyarakat, bukan hanya dalam dukung mendukung capres atau partai politik. Masalah yang muncul ketika kiai berpolitik bukanlah pada substansi keterlibatannya, tetapi penggunaan otoritas atau legitimasinya. Selama otoritas tersebut tidak digunakan dalam politik, politik kiai dapat dibenarkan. Politik menurut Syatori (2018) adalah arena untuk mengartikulasikan peran kenabian, yaitu amar makruf nahi munkar, yang dipahami sebagai perintah untuk melakukan ibadah sosial. Menurut *Ushul Fiqh*, kata amar atau 'perintah' dari semboyan amar makruf nahi munkar itu dapat dikatakan 'amar' jika posisi orang yang memerintah itu lebih tinggi dari orang yang diperintah.

b. Pesantren Bendakerep

Selain Pesantren Buntet, pesantren yang menarik untuk dikaji dalam relasinya dengan dunia politik adalah Bendakerep. Pondok Pesantren Bendakerep didirikan oleh Mbah Soleh atau K.H. Muhammad Soleh pada 1920-an yang masih keluarga dengan pendiri Pesantren Buntet. Dalam perkembangannya, pesantren ini tetap mempertahankan karakteristik tradisionalnya. Sekarang ini memiliki 240 santri pria dan sekitar 100 santri perempuan, berasal dari Cirebon maupun daerah lain

di luar Cirebon. Menurut Rihanah (2013), Masyarakat Benda Kerep yang merupakan masyarakat santri menolak masuknya teknologi, seperti radio, televisi, dan jembatan beton. Radio dan televisi dianggap dapat membawa pengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat yang sudah baik. Dengan demikian, ketiadaan radio, televisi dan jembatan akan menjaga keberlangsungan dan kebudayaan masyarakat santri dari pengaruh negatif dari luar. Selain budaya, mereka juga khawatir jika nilai-nilai dan sendi-sendi ajaran Islam yang dibangun oleh Mbah Soleh akan hilang dengan masuknya teknologi.

Informasi mengenai konsep dan praktik berpolitik Pesantren Buntet di atas dikonfirmasi oleh WH (WH, wawancara, 21 November, 2021), Ketua Yayasan Wangsakerta, yang juga mengkaji praktik-praktik politik praktis kiai di Cirebon pada 2013, membandingkan dua pesantren tertua di Cirebon, yaitu Buntet dan Bendakerep. Pesantren Bendakerep merupakan pesantren klasik di Cirebon, terletak di desa terpencil (pedesaan) yang berbatasan dengan hutan, tetapi masih masuk dalam wilayah Kota Cirebon. Pada masa lalu, masyarakatnya terkenal antiteknologi, bahkan tidak menggunakan listrik. Pondok pesantren terletak antara sungai dan kampung. Namun, masyarakatnya tidak antinegara. Mereka tetap berpartisipasi dalam pemilu dan berinteraksi dengan partai politik, tetapi tidak pernah mendukung dan melibatkan diri dalam politik praktis. Saat melaksanakan pemilu, setelah mencoblos mereka tidak menggunakan tinta KPU, tetapi menggunakan kunyit. Oleh karena jumlahnya kecil dan kurang berkembang, jumlah politisi yang masuk ke pondok lebih kecil dibandingkan pesantren lain. Pesantren ini lebih mengembangkan dirinya sebagai sarana pertapaan dan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan.

Pandangan mereka dalam berpolitik adalah keinginan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang peduli terhadap keagamaan Islam dan berpikir bahwa negara yang merdeka akan melindungi umat Islam. Dilihat dari jalur-jalur intelektual Islam, kaidah umumnya adalah kebijakan penguasa yang suportif terhadap kemaslahatan umat. Hal ini sebenarnya tidak berbeda dengan politik pesantren. Pesantren

ini tidak antinegara dan tidak antipolitik, tetapi tidak melibatkan diri dalam politik praktis, atau menahan diri dari politik. Pemimpin pondoknya adalah K.H. Miftah. Meskipun demikian, pondok ini tidak pernah menolak jika didatangi oleh para politisi atau partai politik.

Pada waktu maulud nabi, kampung tempat lokasi pondok ini menjadi sangat ramai karena banyak orang berkunjung untuk mendapatkan berkat (makanan yang dibungkus) dari pesantren. Mereka juga membeli hasil-hasil kebun dan kerajinan yang dihasilkan oleh penduduk kampung. Kampung ini terkenal sebagai tempat tirakat, bertapa, dan berkhalwat, untuk mencari ilmu dan meningkatkan spiritualitas. Terdapat makam pendiri pondok, yaitu Mbah Soleh, yang hingga saat ini masih dikeramatkan.

Berbeda dengan Bendakerep, Pesantren Buntet lebih terlibat dengan politik praktis. Dahulu di awal kemerdekaan, terdapat perbedaan pandangan antara kalangan Tarekat Tijaniah dan Syatariah di Mertapada. Tijaniah akhirnya menyingkir ke Bendakerep, sedangkan Syatariah tetap di Buntet. Namun, Tarekat Syatariah juga pecah dan memunculkan Tarekat Syahadatain yang mendirikan Pondok Pesantren Munjul di Mertapada. Sementara itu, Bendakerep menahan diri dari keterlibatan dengan politik praktis atau mengambil jarak, Pesantren Buntet menyadari bahwa dunia politik termasuk politik praktis adalah strategi untuk menguasai sumber daya dengan logika sebagai berikut. Pertama, menguasai politik berarti memiliki akses terhadap kelompok yang berkuasa yang memiliki akses terhadap sumber daya termasuk kekuasaan dan ekonomi. Kedua, kepenguasaan sumber daya didasarkan atas siapa yang kuat dan siapa yang menang. Ketiga, menyadari posisi pesantren sebagai *vote getter* dalam setiap pemilihan umum, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, di mana semua calon dan parpol akan meminta restu ke pesantren. Keempat, membangun dan mempraktikkan cara berpikir bahwa tidak hanya parpol dan kandidat yang memanfaatkan pesantren, tetapi pesantren juga memanfaatkan politisi.

Sebagai akibatnya, kurang lebih 52 pondok pesantren di wilayah Cirebon raya memiliki berbagai afiliasi parpol yang berbeda beda. Untuk mewadahi bantuan dari partai politik, sejumlah pondok

mendirikan yayasan mengikuti *formalisme* hukum, guna memanfaatkan bantuan dana pemerintah maupun partai politik sehingga bantuan dari para politisi yang berbentuk pembangunan infrastruktur baik sekolah, masjid, kantor yayasan, dan lain-lain, dapat diterima. Meskipun masing-masing pondok pesantren yang masih satu keluarga memiliki perbedaan pandangan politik dan aliran politik, mereka memiliki kesadaran yang sama, yaitu jangan sampai pesantren dimanfaatkan oleh para politisi dan partai politik, melainkan apa yang dapat mereka berikan kepada pesantren. Kekuatan sebuah pesantren tidak terletak pada jumlah murid yang memondok, tetapi pada jaringan dan jumlah alumninya serta posisi apa yang mereka duduki. Misalnya, Bupati Cirebon, Sunjaya, yang walaupun dicalonkan dari PDIP dan menjadi politisi PDIP, mengeklaim pernah memondok di Ciwaringin di masa kecilnya. Oleh karena itu, ia mengeklaim memiliki legitimasi sebagai orang pesantren.

Mengapa orientasi keagamaan ormas-ormas atau pondok pesantren di Cirebon lebih moderat daripada di Priangan Timur? Kenapa partai-partai Islam kalah di Cirebon dengan partai-partai nasionalis? Hal ini disebabkan karena Cirebon adalah titik temu antara budaya Matraman yang moderat atau kultural dengan Jawa Barat dan Sunda yang Islam formal. Pada umumnya, sebagian pesantren dan ormas Islam di Priangan Timur merupakan pendukung dari Gerakan DI/TII pada masa lalu karena mereka dikecewakan oleh kebijakan restrukturisasi dan rasionalisasi angkatan perang Kabinet Hatta yang mengeksklusi laskar-laskar Islam dari NU.

Ketika muncul isu Ahok menodai agama Islam, hanya sedikit komunitas NU Cirebon yang datang. Lebih banyak yang datang dari komunitas di Priangan Timur karena mereka masih memiliki memori dan kesadaran sejarah konflik di masa lalu dan kekecewaan terhadap republik yang pernah melukai perasaan mereka pada masa revolusi. Aksi 212 merupakan ekspresi dendam sejarah terhadap NKRI di masa lalu. Islam Sunda lebih banyak mengikuti politik *formalisme* dan mendukung penegakan syariat Islam, seperti di Tasikmalaya dan Cianjur. Dalam pertarungan politik ini, Cirebon merupakan titik

temu antara Jawa Tengah dan Jawa Barat atau antara Islam di Jawa bagian barat dan Islam di Jawa bagian timur. Apa yang dilakukan Cirebon tidaklah dengan mendirikan pesantren, tetapi memperkuat masyarakat sipil Islam dengan mendirikan sekolah alam untuk mendidik anak-anak petani yang putus sekolah agar kembali belajar untuk mengelola tanahnya sehingga mereka dapat melestarikan dan menjaga kehidupan masyarakat kampung.

c. Pesantren di Kuningan

Selain membahas Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, bab ini juga membahas gerakan masyarakat sipil Islam di Kuningan untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai gerakan Islam di Cirebon Raya. Narasumber yang diwawancarai adalah pengasuh Pesantren Al Muttawaly (DNR, wawancara, 23 November, 2020). Menurutnya, di antara masyarakat Cirebon dan Kuningan terdapat perbedaan perspektif terhadap kiai yang berimplikasi pada hubungan sosial dan kultural antara kiai dan umatnya. Di Cirebon, penghormatan umat terhadap kiai-nya lebih kental daripada di Kabupaten Kuningan. Hal ini dapat dimengerti mengingat sejarah berdirinya kerajaan atau kesultanan Cirebon dipelopori oleh kalangan ulama sehingga kedudukan kiai masih dihormati.

Dalam bukunya berjudul *Jaringan ulama di Cirebon Raya* yang merupakan hasil survei deskriptif sejumlah pondok pesantren di Cirebon, seperti Bendakerep, Buntet, Ciwaringin, dan Balerante, Rosidin (2019) mendapatkan sejumlah temuan sebagai berikut. *Pertama*, jika ditelusuri, sejarah munculnya pesantren di Cirebon tidak dapat dilepaskan dari Pesantren Buntet sebagai pondok tertua. Tradisi yang dianut adalah masyarakat patuh pada kiai. Namun, di Kabupaten Kuningan, basis pesantren tidak sekuat di Cirebon. Walaupun Syekh Bayanullah sudah menyebarkan agama Islam di Cirebon pada masa Syekh Nurjati, ia mendirikan pondok di Cipari, Sidapura. *Kedua*, setelah Syekh Bayanullah, beberapa puluh atau ratus tahun muncul ulama Kuningan yang terkenal, yaitu Eyang Hasan Maulani, yang diundang ke Manado bersama Kiai Mojo (Faturrahman, Kusmana).

Ketiga, Kiai Sobari yang memiliki murid K.H. Abdul Halim kelak mendirikan Persatuan Umat Islam (PUI). Ia memiliki memiliki murid Kiai Sanusi yang menjadi pengasuh pondok Hayatul Ulum. Di Majalengka, Kiai Sobari memiliki murid Abah Umar yang merupakan pendiri Tarekat Syahadatain. Di Cirebon tarekat ini didirikan oleh K.H. Abdulah Syatori di Pesantren Arjawinangin, sekarang ini dipimpin oleh Amin Summa dan K.H. Husain Mahmud. *Keempat*, Abah Muttawaly merupakan keturunan dari Kiai Saleh Zamzami, pendiri Pesantren Bendakerep. Kiai Saleh sendiri masih keturunan Raden Mutaat. Dengan demikian, Al Muttawaly juga masih merupakan keluarga dari Pesantren Bendakerep yang juga berawal dari Pesantren Buntet.

Muhaimin A.G. dalam bukunya *Islam dalam bingkai budaya lokal: Potret dari Cirebon* (2002: 337) mengatakan bahwa Islam tradisional dicirikan dengan pesantren dan tarekat. Pesantren adalah tempat di mana syariat diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sedangkan tarekat adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk membangun dimensi eksoterik Islam, terutama pada kalangan orang tua. Pesantren Buntet menghormati tarekat Syatariah dan Tijaniyyah yang datang kemudian. Jika ditelusuri, penyebaran tarekat Syatariah melalui tiga jalur, yaitu keraton (Syekh Abdul Hamid Pangeran Raja Kanoman), Buntet (K.H. Abdul Muhyi), dan Kaliwija (K.H. Azha, K.H. Aiswandi, K.H. Saleh Zamzam, dan K.H. Muttawaly. Sementara itu, tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kuningan, yaitu Syekh Bayanullah yang kemudian diteruskan Syekh Gunung Jati, dibantu oleh Ong Tien yang menurunkan Pangeran Adipati Kuningan.

Secara kultural, masyarakat Islam di perdesaan Kuningan masih melakukan tradisi tahlilah, barzanji, dan lain-lain. Namun, mereka tidak berafiliasi dengan NU sebagai organisasi, yang selama ini dikenal identik dengan Islam tradisional. Sekarang ini, mereka dalam beragama mengikuti *popular religious practices*, seperti mengadakan pengajian dengan mengundang habib dan sejenisnya. Meskipun amaliahnya sebagian pesantren tersebut mengikuti tradisi NU, tetapi ada pergeseran sebagai berikut. *Pertama*, Pesantren Al Ikhlas di Ciawi,

Pangkalan, Kuningan, sudah mengikuti model Pondok Pesantren Gontor. *Kedua*, Pesantren Husnul Khotimah dan Ponpes Muzamul Ulum yang dulunya NU sudah menjadi basis PKS di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana. Namun, ada berita yang menyebutkan bahwa Ponpes Husnul Khotimah sudah terbuka dan mengadopsi kerja sama dengan semua pihak. *Ketiga*, Ponpes di Kuningan bagian selatan mengikuti gaya Manonjaya, dengan berafiliasi pada Miftahul Huda dan bergabung dengan Himpunan Alumni Miftahul Huda (HAMIDA). Sementara itu, ponpes di Kuningan bagian utara termasuk Al-Mutawally, Desa Timbang, mengikuti atau dipengaruhi oleh Bendakerep dan Buntet. Kuningan Timur dipengaruhi oleh Miftahul Huda dan pesantren Cirebon campuran atau hibrida. Meskipun secara amaliah sama, ada perbedaan budaya dan praksis sosial serta interaksi dalam keagamaan antara pedalaman Kuningan yang lebih egaliter dengan Cirebon yang hirarkis.

Di Kuningan, terdapat sejumlah ormas Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Mathlaul Anwar, dan FPI. FPI, diketuai Ustaz Lukman yang bukan orang asli Kuningan, didukung oleh Pesantren Nurul Dayah di Desa Timbang, yang diasuh oleh Kiai Ade. Walaupun FPI dan NU memiliki pandangan keagamaan yang sama terhadap Ahmadiyah bahwa JAI merupakan aliran sesat dan bukan bagian dari Islam, keduanya memiliki perbedaan dalam cara memperlakukan JAI. NU masih dapat duduk bersama atau minum kopi bersama JAI. Ahmadiyah masih merasa nyaman dan dekat dengan NU daripada dengan FPI dan Islam politik lainnya. Sedangkan Persis, Muhammadiyah, dan FPI bersikap keras dan tidak ada kompromi terhadap Ahmadiyah.

Sunda Wiwitan (SW) di Kuningan juga cukup kuat; mereka membangun Batu Sekampung, sebuah patung besar untuk berdoa. Sebetulnya, semua ormas Islam tidak ada yang memiliki kepentingan karena SW adalah aliran kepercayaan yang sudah diakui oleh pemerintah. Namun, karena ketakutan patung itu akan menyesatkan umat Islam, mulai dipersoalkan izin mendirikan bangunan tempat ibadah mereka. Hal ini sebenarnya kelemahan dakwah umat Islam yang

ditonjolkan keluar bahwa ormas Islam tidak cukup untuk berdakwah sehingga umatnya tidak datang ke Batu sekampung, seperti Goa Maria di Yogyakarta yang menjadi tempat wisata. Ibaratnya kelemahan sendiri ditimpakan kepada orang lain. Sedangkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Kuningan di Desa Manis Lor, Jalaksana, sudah disana sejak 1950. Jumlah penganutnya sudah mencapai 60% dari penduduk desa maka mereka dapat menguasai posisi kuwu (lurah). Desa ini memiliki jumlah komunitas Ahmadiyah terbesar di Indonesia.

Menurut DNR (wawancara, 23 November, 2020), jika diperhatikan, kebanyakan pondok pesantren berada di jalur lalu lintas Cirebon-Cilimus-Kuningan sampai Ciamis. Hal ini berarti komunitas santri hanya terkonsentrasi “di sepanjang jalan aspal”. Di pedalaman, mereka dalah Islam nominal atau sekuler. Oleh karena itu, PDIP di Kuningan menang meskipun jumlah santri menurut Kementerian Agama pada 2012 ada 30.000 orang. Ada lima pesantren terbesar yang memiliki siswa 1.000 orang, seperti Husnul Khotimah, Mutazam Al-Kautsar, dan Mambaul Ulum. Di daerah-daerah urban, posisi umat Islam lebih kuat baik di media maupun di gerakan. Jika di abad ke 15, menurut Anthony Reid (2000), Islam disebarkan melalui jalur pelabuhan atau maritim, sekarang ini Islam pada abad ini digerakkan oleh pembangunan infrastruktur jalan aspal.

Sementara itu, konsepsi berpolitik ormas Islam di Kuningan tidak berbeda jauh dengan pada tingkat nasional. Tidak ada yang memiliki ideologi, seperti halnya partai-partai politik nasional. Baik parpol maupun politisi tidak memiliki visi atau imajinasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang ingin diwujudkan. Hal ini berbeda dengan Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat. Pertama bersifat populis, tidak mendasarkan pada ras dan agama, serta meningkatkan pembayaran pajak agar dapat didistribusikan. Kedua mendasarkan pada nasionalisme, perlindungan ras kulih putih, dan penurunan pajak. Di Kuningan sebagaimana daerah lain, orang lebih mudah berganti parpol. Masyarakat memilih parpol atau kandidat karena afiliasi keluarga, kerabat, dan afiliasi yang lain. Di

Kuningan, PDIP tidak berbasis pada wong cilik, melainkan dikelola oleh kalangan orang kaya Kuningan atau pengusaha.

Terkait dengan Perda Syariah, DNR (wawancara, 23 November, 2020) mendukung pemberlakuannya karena mendukung perkembangan dakwah Islam. Kabupaten Kuningan memiliki Perda Diniyah, seperti di Tasikmalaya, yaitu persyaratan untuk bisa membaca Al-Qur'an bagi mereka yang ingin masuk SMP dan SMA. Di samping itu, juga terdapat perda untuk pengendalian miras. Bahkan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri 2008 terkait pendirian tempat ibadah diusulkan oleh Ketua MUI Kuningan K.H. Ahmad Noor. SKB ini lebih sesuai diterapkan di Kuningan yang penduduknya lebih homogen, Sunda-Islam, daripada di Cirebon yang lebih heterogen.

Fenomena yang sekarang berkembang di pedalaman Kuningan adalah pengajian *popular religious practices*, yakni pengajian habib yang disakralkan. Pengajian yang dihadiri habib cenderung lebih banyak mendatangkan massa dan peserta daripada pengajian NU. Namun, fenomena ini lebih banyak dipengaruhi oleh media sosial dan diduga tidak akan bertahan sampai dengan jangka panjang. Hal ini berbeda dengan pengajian Buya Yahya yang tidak membangun kultur kultus individu dan karisma. Ia lebih banyak memberikan pencerahan, termasuk debat dengan merujuk pada kitab-kitab. Pesertanya lebih banyak kaum intelektual perdesaan yang ingin menimba ilmu agama. Sementara itu, pengajian habib lebih banyak dihadiri oleh masyarakat kelas bawah di perdesaan. Masyarakat Islam bawah ini dikendalikan oleh isu bahwa ustaz yang sedang *ngetrend* di Twitter atau Youtube maupun TV akan diundang.

Berbagai observasi dan kajian literatur tersebut menunjukkan bahwa kelompok sipil Islam yang *mainstream* di Cirebon Raya dan juga di Indonesia pada umumnya, setelah reformasi 1998, menjadi lebih akomodatif terhadap negara. Sistem politik demokrasi menempatkan sipil Islam ini sebagai kelompok moderat, yang juga menyediakan sumber mobilisasi massa atau konstituen dan kepemimpinan politik. Mereka ini diuntungkan dari sistem politik demokrasi terutama dalam pembagian distribusi kekuasaan maupun sumber daya yang menyer-

tainya. Dari politik nasional sampai lokal, kelompok Islam moderat ini berpartisipasi aktif mendukung sistem politik demokrasi dan memperoleh alokasi sumber daya dari negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. Penutup

Berdasarkan paparan sebelumnya, dapat diketahui beberapa ormas-ormas Islam yang dapat dikategorikan islamis atau mendukung Islam politik di Cirebon raya, misalnya GAPAS, Al-Mannar, serta MMI di Kota Cirebon dan FPI di Kabupaten Kuningan. Namun, pada saat ini, terutama pascapilpres 2019, hampir semua ormas Islam yang dikategorikan sebagai islamis tidak kelihatan aktif, dan seperti berubah menjadi majelis taklim. Hal tersebut diduga karena pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah tidak memberikan ruang gerak bagi kelompok ini, yang distigmakan dengan 'intoleran dan radikal.' Sementara itu, kebanyakan ormas Islam besar, seperti NU dan Muhammadiyah dan juga beberapa pesantren *salafi* tidak mendukung gerakan politik islamisme. Kelompok ini lebih memilih memperkuat masyarakat sipil dengan pengajian, pendidikan, dan terlibat dalam politik. Secara historis, Cirebon Raya merupakan titik pertemuan antara kelompok-kelompok Islam kultural yang kebanyakan berkembang di Jawa Timur dan Tengah dan Islam formal yang lebih didominasi oleh etnis Sunda.

Konsepsi dan praktik berpolitik ormas-ormas Islam di Cirebon Raya tidak jauh berbeda dengan di tingkat nasional. Kalangan Islam tradisional berpandangan bahwa politik dalam pandangan Islam haruslah dilakukan dan bertujuan untuk menegakkan *akhlakul kharimah*, sedangkan dalam pandangan Islam pembaharuan, konsepsi politik adalah menegakkan syariat dan amar makruf nahi mungkar. Kalangan Ikhwanul Muslimin menekankan pada pentingnya untuk mengembalikan Islam ke politik moral, bukan politik yang didasarkan atas kepentingan material. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya politik persatuan untuk mencapai kemenangan dan kejayaan umat Islam. Namun, kalangan Islam tradisional maupun pembaharuan

mencapai titik temu bahwa demokrasi merupakan bentuk lain dari musyawarah yang dapat diadopsi oleh Islam.

Temuan lapangan mengenai konsep berpolitik ormas Islam di Cirebon ini mendukung tesis Hefner bahwa kebanyakan masyarakat sipil Islam mendukung bekerjanya nilai-nilai dan sistem politik demokrasi. Namun, pada sisi lain, mungkin kritik terhadap tulisan Hefner benar bahwa kelompok-kelompok Islam yang dikajinya merupakan kelas menengah Islam, bukan kelompok-kelompok muslim yang termarginalkan yang tidak menikmati pembangunan dan yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan. Kelompok-kelompok yang terakhir ini barangkali luput dari kategori *civil Islam* Hefner, atau kategori tersebut mungkin hanya tepat untuk memotret satu kelas sosial saja.

Menurut Hikam (1991), antara 1970 sampai 1990-an, agama dan gerakan keagamaan berada dalam posisi defensif terhadap kekuasaan negara dan hegemoni ideologisnya. Namun, pada masa kini, hampir semua gerakan keagamaan bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan politik, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Hal ini memberikan ruang pada gerakan Islam politik untuk mengekspresikan ideologinya yang militan.

Terakhir, penulis ingin menyampaikan bahwa kesiapan masyarakat sipil Islam terhadap sistem politik demokrasi mengalami tantangan pada masa kini. Periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo lebih dikenal sebagai rezim populis yang kurang menghargai nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Bahkan, sebagian kalangan menyebutnya sebagai rezim *developmentalis* atau neo-Orde Baru. Hikam menulis dalam Majalah Prisma (1991) bahwa negara Orde Baru mendasarkan struktur kekuasaannya pada alienasi antara birokrasi (sipil dan militer), borjuasi nasional, dan teknokrat. Meskipun struktur tersebut tidak persis dengan struktur politik sekarang yang didominasi oleh kelompok oligarki, setidaknya rezim *developmentalis* ini tidak peduli dengan nilai-nilai demokrasi. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil Islam. Jika sipil Islam konsisten, mereka harus bersatu dalam plat-

form untuk menjaga kerangka sistem politik demokrasi dan memilih rezim yang lebih demokratis melalui mekanisme pemilihan umum.

Daftar Referensi

- Bruinessen, M. (Ed). (2013). *Contemporary developments in Indonesian Islam: Explaining the “conservative turn”*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Ciremaityday. (2019, 27 Juni). Keluarga Ketua JAD Kota Cirebon sayangkan sikap kepolisian. *Kumparan.com*. <https://kumparan.com/ciremaityday/keluarga-ketua-jad-kota-cirebon-sayangkan-sikap-kepolisian-1rMIqhef8KB/full>
- DPRD Kabupaten Kuningan (2021). *Profil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan*. <https://dprd.kuningankab.go.id>
- Eko, Z. A. (2010). *Mendeskripsikan potensi kekerasan kaum muda di Cirebon dan Ciamis* [Laporan Penelitian LP3ES Jakarta tidak dipublikasikan].
- Esposito, J. L. (2000). Political Islam and the west. *JFQ Forum*.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: Towards a new phase of deepening illiberalism?. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Hasani, I. (2010). *Wajah Para Pembela Islam*. Pustaka Masyarakat Setara.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in indonesia*. Princeton University Press.
- Hefner, R. W. (Ed.). (2009). *Making modern muslims: The politics of Islamic education in Southeast Asia*. University of Hawaii Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt6wqvz8>
- Hikam, M. A. S. (1991). Negara, masyarakat sipil dan gerakan keagamaan dalam politik Indonesia. *Prisma, Majalah Pemikiran Sosial dan Ekonomi*, 3(XX), 75–86.
- Jamil, A. (2010). Pandangan pimpinan Pesantren Buntet terhadap paham radikal dan liberalis. *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, IX(35), 212–228.
- KPU. (2019a). *Daftar calon terpilih anggota DPR RI pemilu 2019*. Diakses pada 31 Maret, 2021, dari <https://www.kpu.go.id/page/read/1099/hasil-pemilu-2019>

- KPU. (2019b). *Pengumuman nomor 694/pl.01.9-pu/3274/kpu-kot/vii/2019 tentang daftar calon terpilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Cirebon pemilihan umum tahun 2019*. Diakses pada 31 Maret, 2021, dari <https://kota-cirebon.kpu.go.id/berita/baca/7800/pengumuman-nomor-694pl019-pu3274kpu-kotvii2019-tentang-daftar-calon-terpilih-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kota-cirebon-pemilihan-umum-tahun-2019>
- Makhsun, S. (2020, 31 Agustus). Melihat ulang jejak ikhwanul Muslimin di Indonesia. *Jalandamai.org*. <https://jalandamai.org/melihat-ulang-jejak-ikhwanul-muslimin-di-indonesia.html>
- Maknunah, & Hasim, W. (2019). Tradisi haul di pesantren: Kajian atas perubahan-perubahan praktik haul dan konsep yang mendasarinya di Buntet Pesantren, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tahun 2000-2019. *Jurnal YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.24235/jy.v5i2.5662>
- Maulana, Y. (2019, 25 Agustus). Ja'far Umar Thalib (1961–2019). *Portal Islam*. <https://www.portal-islam.id>
- Mietzner, M., Muhtadi, B., & Halida, R. (2018). Entrepreneurs of grievance: Drivers and effects of Indonesia's Islamist mobilization. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 174(2–3), 159–187.
- Muhaimin, A. G. (2002). *Islam dalam bingkai budaya lokal: Potret dari Cirebon* (Edisi kedua). Logos Wacana Ilmu, Adikarya, dan The Ford Foundation.
- Panjimas.com. (2014, 14 Agustus). Penjelasan AL-MANAR: AL-MANAR Tak Terkait ISIS & Bersikaplah Adil Soal ISIS. *Panjimas.com*. <https://www.panjimas.com/news/2014/08/14/penjelasan-al-manar-al-manar-tak-terkait-isis-bersikaplah-adil-soal-isis/>
- Reid, A. (1999). *Charting the shape of early modern Southeast Asia*. Silkworm books.
- Rindanah, R. (2013). Geneologi Pesantren Benda Kerep dan Pesantren Buntet Cirebon: Suatu perbandingan. *Holistik: Journal for Islamic Social Sciences*, 14(2), 209–230. <http://dx.doi.org/10.24235/holistik.v14i2.449>
- Rosidin, D. N. (2019). *Jaringan ulama Cirebon: Keraton, Pesantren dan Tarekat*. LPPM IAIN Syekh Nurjati

- Suhanah, S. (2014). Potret Radikalisasi gerakan keagamaan: Studi Kasus Organisasi GARDAAH di Kota Cirebon, Jawa Barat. *Harmoni* 13(2), 134–145.
- Syatori, A. (2018). Tafsir dan ijtihad politik pesantren: Suatu perspektif dari Pondok Buntet Pesantren Cirebon. *Jurnal YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, 4(2), 350–383. <http://dx.doi.org/10.24235/jy.v4i2.3552>
- Tibi, B. (2016). *Islam dan Islamisme*. Mizan.
- Yayasan Al-Bahjah Cirebon. (t.t.). *Sejarah berdirinya Yayasan Al-Bahjah*. Diakses pada 18 Januari, 2023, dari <https://albahjah.or.id/sejarah-berdirinya-yayasan-al-bahjah/>